

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. W. (2024). Politics and Social Welfare: Dynamics of Social Assistance Programs on Electability in Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 9(2), 205–215.
- Ardipandanto, A. (2021). Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan. *Kajian*, 26(1), 51–74.
- Arhansyah, R. J., Cahya, N. N. P., Pribadi, M. F., & Anhar, I. A. (2024). Analisis Sistem Pemilu Proporsional Dan Dampaknya Terhadap Representasi Politik Perempuan di Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(3), 226–234.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Begouvic, E. (2021). Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105–122.
- Firmansyah, M. I., Rahmanto, F., Purwaningsih, & Rafi, M. (2021). Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. *Jurnal Wacana Politik*, 6(1), 26–36.
- Goodpaster, G. (2001). *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*. Jakarta: USAID.
- Hartati, S., Setiawati, S., & Rubiyanto. (2024). Analysis of Social Assistance Distribution During Election Period from The Perspective of Social Justice for All Indonesian People. *UNTAG Law Review*, 9(1), 1–8.
- Hawing, H., Fadillah, & Parawu, H. (2020). Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance*, 2(2), 192–204.
- Homans, G. C. (1961). *Social Behaviour: Its Elementary Forms*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Ismawan, I. (1999). *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Kavanagh, D. (1983). *Political Science and Political Behaviour*. London: Allen and Unwin.
- Laia, M., & Kusmanto, H. (2021). Pengaruh Politik Uang dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019. *Perspektif*, 10(2), 416–423.
- Lampus, Lopian, & Sondakh. (2022). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3), 1–9.
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *Justisi*, 8(2), 95–107.
- Meilinda, Y. (2021). Preferensi Politik Pemilih Milenial dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)*, 3(1), 186–200.
- Muhsin, A. bin A. (2001). *Suap dalam Pandangan Islam (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi)*. Jakarta: Gema Insani.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 138–153.
- Nugroho. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Nuryadi, Astuti, Utami, & Budiantara. (2017). *Dasar-dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Plano, J., Riggs, R., & Robin, H. (1982). *The Dictionary of Political Analysis*. Oxford: Clio Press.
- Pramudhita, P., & Asfar, M. (2024). Hubungan antara ketokohan Gus Ali, identifikasi partai dan politik uang dengan pilihan masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 (Studi kasus pilihan kepada pasangan Ahmad Muhdlor Ali Subandi). *Jurnal Politik Indonesia*, 10(1), 62–71.
- Rahayu, S. L. (2012). *Bantuan Sosial di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Satriawan, I., & Ramadhani, F. S. (2022). *The Impact of Money Politics to the Indonesian Democratic System: With Special Reference to South Kalimantan Governor Election 2020*. 3–16.
- Sinambela, L. P., & Sinambela, S. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press .

Solahudin, A. H., Bariah, C., Herniwati, & Faried, F. S. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Kedua). Bandung: Alfabeta.

Syafrudin, I., & Maiwan, M. (2023). *Politik Indonesia Kontemporer*. Jakarta: UNJ Press

Thoifah. (2015). *Statistik Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salamadani.

Vikaliana, Pujiyanto, Fika, Ronaldo, Reza, Ngii, Dwikotjo, Suharni, & Ulfa. (2022). *Ragam Penelitian dengan SPSS*. Sukoharjo: Tahta Media Group.

Wardhana, A. (2020). Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 49–62.

Undang-Undang

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Indonesia. (tanpa tahun). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

